

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi. Keterlibatan lembaga keuangan dalam pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menyediakan modal. Akibatnya, keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan menjadi sangat penting. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan dan merupakan urat nadi perekonomian, khususnya sektor riil yang digerakkan secara langsung maupun tidak langsung oleh perbankan. Bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November tentang Perbankan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pentingnya peranan perbankan dalam pembangunan perekonomian menunjukkan bahwa berkembangnya perusahaan perbankan merupakan hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Bertumbuhnya sebuah perusahaan membutuhkan modal dari para investor agar pertumbuhan dapat berjalan dengan lebih baik. Namun investor hanya akan melakukan pembelian saham yang tentunya dapat memberikan keuntungan bagi dirinya, dimana salah satu keuntungan tersebut adalah melalui dividen. Dividen

adalah pembagian laba kepada para pemegang saham oleh perusahaan (Hayat et al., 2021).

Kebijakan untuk melakukan pembayaran dividen sangat penting bagi perusahaan, karena kebijakan dividen akan menggambarkan keberhasilan suatu perusahaan, baik mengalami kenaikan maupun penurunan, maka calon investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut. Seorang investor tentunya akan memperhatikan keberhasilan perusahaan sebelum membelanjakan uangnya, karena tentunya investor mencari return dalam berinvestasi..

Pembayaran dividen merupakan salah satu pemenuhan hak pemegang saham yang juga merupakan prinsip dari *good corporate governance*. Istilah *Corporate Governance* seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. Secara umum istilah *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*) (Kusmayadi et al., 2015).

Dalam pelaksanaan GCG yang efektif, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting. Keempat hal tersebut disebut sebagai organ perusahaan. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Dewan komisaris bertugas melaksanakan fungsi pengawasan atas kebijakan Direksi dan memberi nasehat terhadap pelaksanaan tugas operasional Direksi. Dewan Komisaris juga memantau efektivitas penerapan GCG di sebuah perusahaan, sehingga dewan komisaris dapat mempengaruhi segala hal tentang kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan termasuk kebijakan dividen (Boshnak, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Boshnak (2021) menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembagian dividen yang dilakukan perusahaan namun pada penelitian yang dilakukan oleh Shehu (2015) menunjukkan bahwa *board independence* memiliki pengaruh signifikan terhadap *dividen payout ratio*. Perbedaan hasil penelitian yang berbeda ini menunjukkan bahwa terdapat kontradiksi pada hasil penelitian mengenai pengaruh dewan komisaris terhadap kebijakan dividen perusahaan.

Selain ukuran dewan komisaris, adanya komisaris independen juga memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen yang dibayarkan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Perwira & Ratnaningsih (2017) dan Shehu (2015) yang mengatakan bahwa *board independence* memiliki pengaruh signifikan terhadap dividen per share, namun penelitian ini telah sejalan dengan yang dilakukan oleh Boshnak (2021) yang juga menunjukkan hasil bahwa *Board independence* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *dividen per share*. Perbedaan hasil penelitian yang berbeda ini menunjukkan bahwa terdapat kontradiksi pada hasil penelitian mengenai pengaruh komposisi komisaris khususnya jumlah komisaris dan komisaris independen terhadap kebijakan dividen perusahaan.

Kebijakan pembayaran dividen umumnya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dimana dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas

(UUPT) No.40 tahun 2007 diketahui bahwa suara dalam RUPS ditentukan oleh suara dari para pemegang saham. Suara mayoritas dari para pemegang saham akan menentukan setiap kebijakan yang diambil. Dengan demikian, struktur kepemilikan sangat mempengaruhi apakah sebuah perusahaan akan melakukan pembayaran dividen dan berapa besar pembayaran tersebut (Kusmayadi et al., 2015).

Kepemilikan saham disebuah perusahaan dapat dimiliki oleh berbagai pihak seperti pihak manajerial, pihak asing, keluarga, negara atau pemerintah atau institusi tertentu. Setiap pihak dalam struktur kepemilikan perusahaan memiliki kepentingannya masing-masing. Pihak asing, institusi dan pemerintah umumnya menghendaki pembayaran dividen yang tinggi agar tanggung jawab terhadap pemegang saham terutama dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik (Shehu, 2015). Sedangkan pihak manajerial dan pihak keluarga umumnya tidak menghendaki pembayaran dividen yang tinggi karena dapat mengurangi keuntungan ataupun dana yang akan dikelola oleh perusahaan kedepannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Boshnak (2021) menunjukkan bahwa *State ownership* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembagian dividen yang dilakukan perusahaan sedangkan menurut Putri & Yulianto (2020) mengatakan bahwa kepemilikan saham dari pemerintah dapat mempengaruhi kebijakan dividen secara signifikan. Perbedaan hasil penelitian yang berbeda ini menunjukkan bahwa terdapat kontradiksi pada hasil penelitian mengenai pengaruh dewan komisaris terhadap kebijakan dividen perusahaan.

Selain struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris, kondisi keuangan fundamental perusahaan juga mempengaruhi tingkat dividen yang akan dikeluarkan

oleh perusahaan. Kondisi keuangan seperti keuntungan atau hutang yang dimiliki perusahaan sangat mempengaruhi berapa besar jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham (Khatib & Nour, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, berikut beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah komposisi komisaris memiliki pengaruh terhadap tingkat pembagian dividen pada perusahaan di Industri Perbankan di Indonesia?
2. Apakah struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap tingkat pembagian dividen pada perusahaan di Industri Perbankan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui apakah komposisi komisaris memiliki pengaruh terhadap tingkat pembagian dividen pada perusahaan di Industri Perbankan di Indonesia?
2. Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap tingkat pembagian dividen pada perusahaan di Industri Perbankan di Indonesia?

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini membahas fenomena permasalahan yang menjadi perhatian sehingga ditemukan alasan untuk ditindaklanjuti melalui penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu dividen, *board size*, *board indepence*, *board meeting*, *ownership*, *size*, *leverage*, return on asset dan age. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam tesis ini diambil dari berbagai macam buku, literatur, penelitian sebelumnya yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Bab ini membahas langkah penelitian, latar belakang pemilihan narasumber, variabel penelitian, pengukuran data dan metode analisis data atas hal yang ditemukan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan jawaban atas pernyataan-pernyataan dalam rumusan masalah dengan menggunakan metodologi penelitian yang diuraikan dalam Bab 3. Bab ini menjelaskan temuan penelitian dalam bentuk deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian..

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menawarkan hasil dan rekomendasi yang diyakini bermanfaat dalam memecahkan kesulitan dalam penelitian saat ini dan sebagai bahan masukan untuk penelitian masa depan..